

Studiefonds van Het Mangkoenagara VII :1924-1930

Tasya Kaliyana Sanjani ^{a,1}, Eka Yudha Wibowo ^{b,2}

^a Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

^b Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

¹ tasyakaliyanasanjani@students.unnes.ac.id; ² ekayudha@mail.unnes.ac.id;

* Corresponding Author; Tasya Kaliyana Sanjani



Received 14 Juni 2025; accepted 10 September 2025; published 25 September 2025

ABSTRACT

This study examines the implementation of Studiefonds Van Het Mangkoenagoro VII (1924-1930) as a concrete manifestation of the Ethical Political Trilogy, especially in the field of education in Praja Mangkunegaran. This research aims to: (1) analyze the distribution mechanism and implementation of Studiefonds, (2) evaluate the role of Mangkunegara VII in the management of the education fund, and (3) identify the impact on the Sentana and Abdi Dalem. The method used the historical method with the stages of heuristics (Mangkunegaran archives, Studiefonds annual report), source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that Studiefonds was divided into two types: Studiefonds A (funds from the Praja treasury) and Studiefonds B (funds from previous recipient installments). This policy succeeded in increasing access to modern education for bumiputera, although it was limited to the Praja elite. Significant impacts included: (1) the birth of educated personnel for colonial and Praja administrative needs, (2) the emergence of a new social class of educated people. Mangkunegara VII's role was reflected in the establishment of the Commissie van Advies to oversee the distribution of funds and the expansion of Mangkunegaran schools. The novelty of this research lies in finding that Studiefonds became a unique model of community-based education funding in the colonial era, as well as a reflection of the spirit of limited autonomy of Praja Mangkunegaran. The economic crisis of 1930 was a factor in the decline of the program's effectiveness.

KEYWORDS

Studiefonds;
Mangkunegara VII;
Ethical Politics;
Colonial Education;
Praja Mangkunegaran.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license



1. Pendahuluan

Edukasi menjadi suatu pondasi terpenting dalam suatu tatanan negara, pemerintah yang tengah memegang kekuasaan bertanggung jawab atas akses pendidikan masyarakatnya. Ekspansi kekuasaan kolonial pada abad ke-19 merupakan gerakan kolonialisme yang paling besar pengaruhnya dalam membawa dampak perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya di negara-negara yang mengalami penjajahan. Penetrasi kekuasaan politik dan ekonomi Barat mengakibatkan terjadinya proses transformasi struktural dari struktur politik dan ekonomi tradisional ke arah struktur politik dan ekonomi kolonial serta modern (Ricklefs, 2008). Tahun 1900an muncul sebuah desakan yang mengatas namakan sebuah kemanusiaan kepada bumiputera, desakan yang kemudian muncul pada tulisan milik Van Deventer sebagai pemicunya. Gagasan yang ditulis oleh Deventer kemudian direalisasikan dalam pidato Ratu Wilhelmina, tepat di tahun 1901 desakan yang berakar pada gagasan Deventer yang merasa bahwa kerajaan Belanda memiliki “hutang budi” atau sebuah kewajiban moral terhadap bumiputera tanah jajahannya. Kewajiban moral tersebut kemudian berjalan dengan nama politik etis.

Politik etis menekankan tiga aspek utama seperti yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya kemajuan suatu bangsa tercipta dari terpenuhinya aspek pendidikan. Salah satu tiga aspek dalam politik etis yakni, Edukasi menyiratkan bahwa suatu pendidikan diharapkan mampu mengubah arah keadaan suatu bangsa. Pendidikan yang disediakan pemerintah kolonial sudah ada sejak lama, namun seperti yang

diketahui bahwa hanya dari golongan tertentu yang dapat mengenyam pendidikan tersebut. Politik Etis membawa suatu perubahan yang setidaknya dapat membangkitkan semangat bumiputera untuk menempuh pendidikan. Edukasi yang telah didapatkan oleh bumiputera setidaknya membangkitkan semangat untuk menolong dan memperhatikan nasib bumiputera lainnya khususnya dalam hal pendidikan (Wal, 1977). Dampak lain penerapan Trilogi ini khususnya dalam bidang pendidikan adalah, munculnya golongan terpelajar yang nantinya berumpun membentuk sebuah organisasi yang berfokus pada pendidikan bumiputera. Kesadaran akan pentingnya pendidikan digaungkan oleh lapisan terpelajar ini, pemberian dana belajar dari organisasi terpelajar seperti Boedi Oetomo menjadi upaya dorongan untuk merasakan pendidikan yang sama rata di kalangan bumiputera.

Mangkunegaran sebagai salah satu bagian dari Mataram yang berada di bawah orngisir Residen, menjadikan daerah tersebut memiliki sifat semi-otonom. Adanya sifat ini menjadikan Residen sebagai pemegang tertinggi dari pemerintahan yang setelahnya dijabat oleh Sunan, segala peraturan dan kebijakan yang ada mengikuti persetujuan dari Residen yang tengah memimpin (Bakri, 2018). Mangkunegaran sebagai Praja telah lama terbuka akan kebudayaan serta pemikiran yang diadopsi dari Barat, dalam hal ini tidaklah meninggalkan identitasnya sebagai seorang Jawa. Pemikiran yang berakulturasi ini kemudian melahirkan kebudayaan serta kebiasaan baru yang hanya ada di Mangkunegaran. Sejak Mangkunegara II sebagai pemimpin atas Legiun Mangkunegaran telah membuktikan bahwa adanya sebuah akulturasi kebudayaan serta pemikiran Barat yang telah diadopsi oleh Mangkunegaran. Modernisasi di Mangkunegaran dimulai sejak Mangkunegara IV (1861-1881). Modernisasi yang dilakukan berfokus pada pembaruan, terutama dalam hal ekonomi dengan pengembangan sejumlah badan usaha, terutama di industri gula (Wasino, 2008). Modernisasi yang dilakukan oleh Mangkunegara IV dinyatakan cukup berhasil dikarenakan pada masa pemerintahan Mangkunegara IV Praja mengalami masa keemasan. Selain faktor adopsi pemikiran Barat beberapa faktor lain turut menjadi alasan mengapa Mangkunegara IV memilih untuk mengembangkan usaha pabrik gula miliknya, faktor gula sebagai komoditi yang harganya cukup melonjak pada masa itu dipasaran, tanaman tebu sudah biasa ditanam di sejumlah tempat di Surakarta, dan sumber pendapatan Praja secara tradisional dan pajak tidak akan mencukupi (Wasino, 2005). Mangkunegara VI dan VII sebagai pemimpin Praja memiliki pandangan yang serupa terkait pengadaan pendidikan bagi Praja, pendidikan yang telah ada akan dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi budaya Jawa. Pendidikan secara masif dilakukan oleh keduanya sebagai wujud atas keyakinan Mangkunegara VI dan VII, bahwasannya pendidikan akan mampu mengubah cara pandang serta diri seseorang yang nantinya akan bermanfaat bagi sekitarnya. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Praja Mangkunegaran menyesuaikan dengan keadaan zaman, perlu diketahui bahwa akses pendidikan pada masa itu cukup sulit bagi kalangan bumiputera. Pemerintah Kolonial menerapkan beberapa pembatasan terkait sekolah atau pendidikan, dengan prakarsa Mangkunegara VI dan sebagai dampak atas keberhasilan mengembalikan kas Praja Mangkunegara VI mengadakan pemberian dana belajar atau disebut *Studiefonds* yang bertujuan untuk membantu putra Sentana dan Abdi yang ada di Praja Mangkunegaran. Pemberian dana belajar ini terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Mangkunegara VII, adanya *Studiefonds* menjadis sebuah implementasi adana kemajuan dalam berpikir dan sebagai wujud kepedulian Mangkunegara sebagai pemimpin Kadipaten akan kesejahteraan daerahnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1) Bagaimana pelaksanaan serta distribusi *Studiefonds* tersebut, 2) Bagaimana Mangkunegara VII ikut berkontribusi dalam pemberian *Studiefonds*, 3) Dampak diberikannya *Studiefonds* dikalangan Sentana dan Abdi dalem. Adapun tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk menjelaskan bagaimana *Studiefonds* berjalan atau distribusinya, 2) Menjelaskan bagaimana dampak adanya Trilogi Politik Etis bagi kehidupan bumiputera, khususnya dalam hal pendidikan, 3) Untuk menganalisis bagaimana dampak dari adanya pemberian *Studiefonds*. Penelitian ini akan membahas mengenai *Studiefonds Van Het Mangkoenagoro VII: 1924-1930*. Penelitian ini akan berfokus mengenai bagaimana *Studiefonds* berjalan dan sebagai dampak akan penerapan Trilogi Politik Etis ada pada masa itu.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah bagaimana *Studiefonds* memberikan dampak signifikan sebagai implementasi adanya politik etis, terutama pada trilogi etis yaitu edukasi. Selain dampak implementasi yang dihadirkan, model pemberian dana belajar hanya ada di Mangkunegaran yang merupakan Praja dari dinasti Mataram. Selain dampak implementasi dan model pemberian dana yang baru pada paruh abad XX, kebaruan juga ditunjukkan bagaimana pemberian dana ini sebagai contoh bahwa hal ini telah dilakukan di masa lalu.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah. Terdapat empat tahapan, yakni (Kuntowijoyo, 1999); Heuristik merupakan tahapan awal dalam proses penelitian atau metode awal dari penelitian. Pada tahap ini dilakukan pencarian sumber yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dari penelitian ini terdiri atas *arsip-arsip Mangkunegara VII terkait pendidikan, arsip Mangkunegaran Kode A dan K, arsip berkas-berkas pengajuan permohonan Studiefonds*. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang membahas terkait pendidikan serta stratifikasinya pada masa Kolonial. Kritik sumber terdiri atas kritik esktern dan kritik intern. Kritik intern yang dilakukan oleh penulis ada pada bagaimana penulis melakukan, dan memilah sumber yang telah didapatkan. Pada tahapan intern perlu diperhatikan bahwa beberapa naskah atau arsip yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang akan ditulis. Kritik intern pada penelitian diharapkan mampu menjadi penghantar bagi penulis dalam memilah arsip dan data yang dibutuhkan. Interpretasi yaitu usaha penafsiran terhadap data yang telah diseleksi, atau data yang telah dipilah. Data yang telah diseleksi dan yang telah melewati kritik sumber untuk membangun fakta sejarah. Penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan bagaimana *Studiefonds* berjalan, selain berjalannya *Studiefonds* juga menjabarkan bagaimana arah gerak dari pemberian dana belajar ini. Historiografi, yakni penyampaian hasil dari penelitian dalam bentuk tulisan sejarah. Setelah melakukan tiga tahapan sejarah, tahapan terakhir yang dilakukan adalah penjabaran dan menceritakan hasil penelitian secara baik dan benar. Historiografi yang disajikan dan disampaikan dalam bentuk tulisan yang ilmiah. Jurnal yang berjudul *Studiefonds Van Het Mangkunegara VII; 1924-1930*, merupakan bentuk dari historiografi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Latar Belakang Adanya Pengadaan *Studiefonds*

Perubahan angin politik Pemerintah Kolonial berdampak besar bagi kehidupan bumiputera, kehidupan yang dimaksud meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Pemerintah Kolonial sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tanah jajahan memiliki keistimewaan sendiri, dimana golongan Barat hidup sebagai puncak dari rantai makanan. Politik yang dijalankan bertahun-tahun oleh pemerintah kolonial kerap lebih banyak membebankan pada janji daripada pelaksanaannya. Permulaan abad XX kebijakan yang diketahui merubah keadaan tanah jajahan, upaya penaklukan seperti tahun sebelumnya bergeser dan memiliki tujuan baru. Pernyataan-pernyataan atas keprihatinan dan kesejahteraan bumiputera mulai digaungkan, kebijakan ini kemudian melahirkan sebuah perubahan mendasar bagi berbagai macam lapisan. Politik Etis menjadi kebijakan yang muncul pada permulaan abad XX, berakar pada permasalahan kemanusiaan dan keuntungan pada sektor ekonomi (Ricklefs 2008, 327). Desakan dan kecaman yang muncul dilontarkan terhadap pemerintah kolonial, tahun 1899 C.Th.van Deventer menulis sebuah artikel yang berjudul "*Een eereschuld*" atau sebuah hutang kehormatan dalam majalah *De Gids*. Tulisan yang menekankan tiga konsep utama yaitu, Edukasi, Irigasi, dan Transmigrasi atau disebut Trilogi Politik Etis. Van Deventer menyoroti adanya hutang kehormatan pemerintah kolonial atas suburnya tanah negaranya, kesuburan yang diperoleh dari hasil eksploitasi tanah jajahannya (Makmur, D. 1993, 73). Penerapan Trilogi yang berupa edukasi terwujud dalam gagasan penyelenggaraan pendidikan modern bagi bumiputera. Pemerintah kolonial pada bidang pendidikan

menekankan kebijaksanaan pada pokok pikiran sebagai berikut; 1).Pendidikan dan Pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumiputera, untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah, 2).Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan(Makmur,D., 1993 72).

Pendidikan Mangkunegaran jauh sebelum adanya masa Politik Etis berlaku sebenarnya telah ada, pada masa Mangkunegara IV sebelum industri gula berkembang pesat lembaga terdapat laporan umum bahwa di Surakarta pada tahun 1873 terdapat dua lembaga sekolah, yakni Sekolah Dasar Eropa dan Sekolah Guru Bumiputera. Sekolah ini mulanya hanya dimasuki bagi kaum Eropa serta bangsawan, dan orang Eropa yang bekerja di perkebunan tebu Mangkunegaran yang tinggal di Surakarta juga memungkinkan menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut (Wasino, 2008 304). Kemudian bersamaan dengan berkembangnya industri gula Mangkunegaran, lembaga pendidikan yang menonjol di pedesaan adalah sekolah desa atau *Volksschool*. Pendirian sekolah di desa ini lebih lambat dibandingkan dengan sekolah-sekolah desa yang dibangun di wilayah *Gubernemen*. Lebih tepatnya sekolah desa di Mangkunegaran dibangun tahun 1918, sedangkan sekolah yang ada di *Gubernemen* dibangun sejak tahun 1912 (Ricklefs, 2008, 240). Mangkunegara IV berfokus pada jalannya roda ekonomi pabrik gula yang dibangunnya, dengan keuntungan yang didapatkannya mampu menyokong sekolah yang dibangun Mangkunegaran dikemudian hari. Dengan berdirinya pabrik gula dan keuntungannya membawa dampak signifikan dalam pemberian pendidikan di Mangkunegaran. Awal pemerintahan Mangkunegara VI dihadapkan dengan kondisi keuangan yang cukup buruk, kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) terjadinya krisis ekonomi dunia pada masa Mangkunegara V yang berpengaruh pada keadaan ekonomi Praja, (2) Hama tanaman yang merusak tanaman industri, (3) Kesalahan manajemen keuangan praia oleh Mangkunegara V. Masa pemerintahan Mangkunegara VI dihadapkan pada transisi politik yang awalnya adalah politik Liberal menjadi Politik Etis, perubahan ini menjadi dorongan penyesuaian pada masa kepemimpinan Mangkunegara VI. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Mangkunegara VI adalah dengan memperbaiki sistem keuangan Praja, pengelolaan keuntungan dari pabrik gula, dan pajak. Dorongan serta penyesuaian keadaan politik pada masa itu mendorong Mangkunegara VI mendukung adanya pendidikan dengan sistem barat, upaya perhatian Mangkunegara VI dalam dunia pendidikan Praja nampak pada pendirian sekolah yang mendapatkan pengajaran Eropa tanpa meninggalkan akar kultur budaya Jawa. Tahun 1912 sekolah yang berdiri diberi nama *Sekolah Angka Siji* yang kemudian di tahun 1914 diubah menjadi *Holland Inlandsche School* (H.I.S) dengan nama *H.I.S Siswo*.

Sekolah yang berdiri tidak hanya *H.I.S* namun juga terdapat sekolah lain yang berfokus pada perempuan atau lebih dikenal dengan nama *Sekolah Siswa Rini*. Sekolah ini mengambil tempat di halaman istana atau tepatnya di *Tjapuri*, sekolah ini nantinya akan berkembang menjadi lebih baik di mana pemerintahan Mangkunegara VII. Selain mendirikan sekolah Mangkunegara VI juga memberikan dana belajar atau yang dikenal dengan nama *Studiefonds*, pemberian dana ini sebagai upaya dalam membantu pendidikan anak-anak kerabat dan narapraja di Mangkunegaran. Sekolah Siswo yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku merupakan sekolah rendah yang diperuntukkan bagi kalangan atas di Mangkunegaran, seperti putra dari Sentana dan putra dari pejabat Praja (Wibowo, 2011).

Setelah Mangkunegara VI turun takhta penggantinya, Mangkunegara VII memiliki minat yang sama terutama dalam hal pendidikan. Mangkunegara VI telah berhasil memperbaiki keadaan keuangan Praja, yang kemudian dari stabilnya keadaan keuangan tersebut disalurkan pada beberapa bidang salah satunya pendidikan. Pendidikan pada masa kepemimpinan Mangkunegara VII mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan politik yang berlaku. Pemberian dana belajar atau *Studiefonds* yang diadakan oleh Mangkunegara VI, kemudian dilanjutkan oleh Mangkunegara VII. Pemberian *Studiefonds* ini mengalami perkembangan yang pesat, sebagai dampak adanya pendidikan barat yang signifikan melahirkan kelompok-kelompok pergerakan yang diinisiasi oleh kalangan terpelajar, salah satunya adalah Boedi Oetomo. Agenda dari Boedi Oetomo adalah pemberian pembelajaran bagi bumiputera, berangkat dari hal tersebut kemudian menginspirasi Mangkunegara VI dan VII dalam memberikan dana belajar bagi Prajanya. *Studiefonds* didirikan pada tahun 1912, dana yang bertujuan untuk membantu pendidikan

anak-anak Sentana, Abdi Dalem, dan anak dari Perwira Legiun yang terhambat dalam pembiayaan sekolah (Wasino, 2014:189). Pemberian dana belajar ini selain sebagai bentuk atas perhatian Mangkunegaran terhadap prajanya, juga merupakan hasil dari stabilnya keuangan praja. *Studiefonds* memiliki dua bentuk atau jenis yaitu, *Studiefonds A* dan *Studiefonds B*. Keduanya memiliki perbedaan dalam asal muasal dana tersebut *Studiefonds* memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon penerima dana tersebut. Penerima yang telah mendapatkan dana tersebut wajib mengembalikan atau mengangsur dana tersebut, memiliki tujuan agar dana yang telah dikembalikan dapat diberikan lagi ke pemohon dana tersebut. Eksistensi pemberian *Studiefonds* ini berlangsung sangat lama namun, pada tahun 1930an keadaan ekonomi baik di Praja maupun Hindia Belanda mengalami krisis yang cukup signifikan dampaknya bagi perekonomian global.

Kota Surakarta masih mempertahankan ciri khas adat serta budaya jawanya, kedatangan orang Eropa atau Belanda yang mempunyai tradisinya sendiri mengakibatkan adanya akulturasi budaya yang sedikit diserap tanpa meninggalkan identitasnya. Jika melihat banyaknya populasi bangsa Eropa di kota Surakarta pada tanggal 31 Desember 1927 sebanyak 3.214, bangsa Timur Asing 9.407 populasi, kemudian Bumiputera 157.724 (Stroomberg, 2018: 63) dapat disimpulkan seperti pada penjelasan di atas budaya yang dibawa kemudian berakulturasi tanpa meninggalkan jati diri. Mangkunegaran sebagai Praja dinilai cukup berjaya dalam mengelola administrasi, sosial dan budaya, militer dan aspek lainnya. Setelah wafatnya Mangkunegara I yang kemudian digantikan oleh cucunya yaitu, BRM. Sulama atau yang nantinya menjadi KGPA. Mangkunegara II. Pada masa kepemimpinan Mangkunegara II yang mewarisi semangat perjuangan dari leluhurnya, kemudian membentuk suatu korps militer yang hanya dimiliki oleh Praja Mangkunegaran itu sendiri atau yang dikenal dengan Legiun Mangkunegaran. Korps militer milik Praja ini dipimpin langsung oleh KGPA Mangkunegara II yang menjadi ciri khasnya adalah unsur Eropa yang berakulturasi dengan budaya Jawa. Selain pembentukan korps akulturasi budaya Eropa juga tampak pada kegiatan sehari-hari, hal kecil seperti ornamen yang ada di lingkungan Pura, *ageman* yang dikenakan pun juga berbeda dengan yang digunakan oleh Sunan. Budaya yang berakulturasi ini melahirkan sebuah pemikiran, bahwa Mangkunegaran sebagai Praja dapat berdiri sejajar dengan bangsa Barat tanpa meninggalkan akar budaya Jawa. Dimulai dari Mangkunegara II dengan Legiun Mangkunegaran, kemudian mulai berkembang bagaimana kedekatan antara Praja dengan Residen atau pemerintah kolonial hingga Mangkunegara VII dengan keberaniannya dalam memberi dana belajar.

3.2. Pelaksanaan Dan Distribusi Pengadaan *Studiefonds*

Studiefonds terwujud atas kehendak KGPA. Mangkunegara VI yang juga didukung dan disetujui oleh Residen yang menjabat di Surakarta pada masa itu.

Pelaksanaan serta distribusi dari *Studiefonds* memiliki beberapa tahapan serta persyaratan yang wajib dipatuhi oleh penerima. *Studiefonds* yang dicanangkan oleh Mangkunegara VI dan VII memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi jumlah nominal yang diterima maupun cara pengembalian dana tersebut. Menurut surat Pranatan (Peraturan) per-tanggal 15 Oktober 1913 yang bernomor 11/a, penetapan adanya *Studiefonds* yang ditetapkan oleh Residen Surakarta G.P. Van Wijk dengan Mangkunegara VI. Perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan pendanaan telah berjalan pada tahun 1912, dan setahun kemudian ditetapkan.

3.2.1 Pembagian dan Syarat *Studiefonds*

Studiefonds yang berdiri tahun 1912 dan di tahun selanjutnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, setiap tahun lonjakan peminat dari *Studiefonds* bertambah. Pendanaan ini terbagi menjadi dua jenis, yakni; *Studiefonds A* (*Rijks Studiefonds*) dan *Studiefonds B* (*Terugbetaalde studiefonds*) menurut pada *Rijksblad Mangkunegaran* tahun 1917 bernomor 20, pelaksanaan pendanaan dimulai pada tahun 1915. *Studiefonds A* atau *Rijks studiefonds* merupakan pendanaannya diambil dari keuangan negara atau Praja, penerima dari pendanaan ini adalah putra sentana, opsir legiun dan para nara. Berdasarkan pada dokumen *Verslag van het Mangkoenegrosche Studiefonds* yang membahas periode pembukuan tahun 1930, banyaknya penerima *Studiefonds A* baik yang berada di dalam negeri maupun negeri Belanda

sebanyak 298 orang. Mereka yang berhasil mendapatkan ijazah sebanyak 105 orang, pemberian dana tidak sebatas hanya sampai dalam negeri namun hingga ke negeri Belanda. *Studiefonds B* atau *Terugbetaalde studiefonds* merupakan pendanaan lanjutan dari pendanaan *Studiefonds A*, maksudnya dalam pendanaan diambilkan dari uang yang telah dikembalikan dari peminjam baik yang telah lulus maupun bekerja. Angsuran yang dikumpulkan disimpan oleh *Commissie Van Advies*, merujuk pada *Jaarverslag studiefonds Mangkoenegaran boeat taoen 1929* komisi ini terbentuk pada tahun 1918 oleh KGPAA.Mangkunegara VII, sebagai suatu komisi penasihat. Komisi ini terdiri atas; Bupati Patih (Ketua), Utusan Khusus dari Mangkunegaran (Anggota), Komandan Korp Legiun Mangkunegaran (Anggota). Pada tahun 1924, Pemerintah Mangkunegaran menunjuk seorang bendahara yang bertindak sebagai penanggung jawab buku kas (*boekhouder*) yang tugasnya mencakup pengelolaan keuangan dan menyetorkan uang cicilan ke bank dengan tujuan memperoleh bunga, ketika pemohon dana membutuhkan maka diambilkannya melalui angsuran tersebut.

Selayaknya pendanaan yang lain, *Studiefonds* memiliki beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon. *Rijksblad* tahun 1917 nomor 20 pada awal pelaksanaannya dana pendidikan hanya disediakan atau diakses untuk para putra dalem, sentono dalem, para opsir dan pegawai dari pemerintah Praja semata. Kondisi pada masa itu yang memaksa dimana, calon pemohon dana pendidikan atau *Studiefonds* harus memenuhi persyaratan utama selain syarat administratif lainnya. Kewajiban setelah mendapatkan dana pendidikan tersebut, wajib bagi penerima untuk mengangsur pinjaman mereka selama bersekolah. Angsuran yang telah dikumpulkan seperti penjelasan di atas, bertujuan untuk diberikannya ke pemohon berikutnya. Apabila mereka yang tidak berasal dari golongan yang telah disebutkan, mereka harus memenuhi persyaratan umum yang ditanggung dan dimohonkan oleh seseorang yang berhubungan langsung dengan Praja. Selain pemenuhan syarat tersebut, pemohon juga wajib memenuhi persyaratan lainnya (Berkas permohonan *Studiefonds*). Merujuk pada berkas-berkas mengenai *Studiefonds* kas daleman, berikut merupakan persyaratan administratif yang dibutuhkan; 1).Surat Permohonan yang diajukan oleh orang tua sebagai pemohon bantuan *Studiefonds*, 2).Salinan rapor terakhir dari siswa yang mengajukan permohonan *Studiefonds*, 3).Surat keterangan resmi dari kepala sekolah. Berkas yang telah diserahkan akan diperiksa oleh sekretaris komisi namun tetap saja keputusan terakhir berada di tangan KGPAA. Mangkunegoro diperkuat dengan Residen Surakarta.

Tahun 1924 syarat administrasi permohonan diperketat sebagai akibat besarnya jumlah peminat *Studiefonds*, berdasarkan pada *Tweede Jaarverslag* dari *Mangkunegarassche studiefonds* yang diperiksa sampai penghabisan tahun 1924, sebagai akibat yang telah disebutkan di atas kemudian ditekankan bahwa pemohon yang tergolong mampu dengan dana sendiri. Selain itu, ditetapkan bahwa para sentono, opsir dan priyayi yang menanggung tidak diperkenankan menanggung lebih dari tiga anak. Sedangkan pemohon yang bukan putra dari sentono, opsir maupun priyayi yang menanggung harus dua orang, berlaku untuk *Studiefonds B*.

3.2.2 Jumlah Dan Keterangan Siswa Penerima *Studiefonds*

Dua belas tahun semenjak berjalannya *Studiefonds* mengalami kenaikan peminat yang cukup signifikan, pernyataan ini berdasarkan dengan adanya syarat permohonan yang diperketat. Peminat *Studiefonds* tidak hanya bersekolah di lingkup dalam negeri, bahkan sampai ke negeri Belanda. Pelaksanaan pendanaan hingga tahun 1930 dinyatakan cukup berhasil, jumlah penerima *Studiefonds A* baik dari dalam negeri maupun Belanda sebanyak 298 orang, terdiri yang memperoleh ijazah sebanyak 105 orang, yang tidak mendapat ijazah 83 orang dan yang masih belajar sebanyak 110 orang. Jika dibandingkan dengan penerima *Studiefonds B* nampak berbeda jauh. Sebagai perbandingan antara *Studiefonds A* dan *Studiefonds B*, siswa yang mendapat ijazah sebanyak 4 orang, yang tidak mendapat ijazah sebanyak 6 orang dan yang masih belajar sebanyak 26 orang.

Melihat banyaknya penerima *Studiefonds* baik dari jenis A atau B, dapat dikatakan bahwa adanya pemberian dana tersebut mendorong semangat serta antusiasme siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perlu digaris bawahi dalam laporan yang dibuat oleh komisi yang dibentuk KGPAA.Mangkunegara VII dan yang telah disetujui oleh Residen Surakarta, pemberian dana atau

pengajuan permohonan dana baik dari A dan B dilaporkannya dimulai dari jumlah tanggungan orang tua, keluaran orang tua yang didapatkan dari negeri, dan keterangan yang menunjukkan dari mana dan akan kemana dia bersekolah. Tiap anak yang mendapatkan biaya sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya, dalam laporan disebutkan pertimbangan dari *Commissie van Advise* yang dilihat dari laporan belajarnya.

Besaran dana tiap bulan yang didapatkan ditetapkan tahun 1919 yang merujuk pada arsip Mangkunegara VII kode A, beberapa sekolah yang ada di Hindia-Belanda memiliki besaran dana yang berbeda beda. Tabel berikut sebagai gambaran besaran yang telah ditetapkan pada tahun 1919;

Tabel 1.1. Ketetapan Besarnya Dana Studiefonds

Tiap Bulan Tahun 1919, *Arsip Mangkunegara VII kode A 6444*

Jenis dan Bidang Pendidikan	Beasiswa Perbulan
OSVIA (Sekolah Pamong Praja)	f.30,-
OSVIR (Sekolah Hukum Bumiputera)	f.50,-
Technische School di Surabaya, Semarang, Batavia	f.45,-
Technische School di Yogyakarta	f.40,-
HBS	f.50,-
AMS	f.45,-
MULO, Jika orang tuanya tinggal di dalam kota	f.10,-
MULO, Jika orang tuanya di luar kota	f.20,-
STOVIA	f.50,-
Hoogere Kweek School	f.12,5,-
Burlijke Avond School Surabaya	f.45,-
Technische Hoge School Bogor	f.105,-
Hoogere Landbouw School Wegenigen Belanda Selama 1 Tahun	f.1400,-

Dari data di atas dapat dilihat beberapa sekolah yang menjadi tujuan siswa yang mendapatkan *Studiefonds*, sekolah seperti OSVIA ditujukan untuk sekolah sekolah pamong praja yang lulusannya dapat ditempatkan untuk kepentingan birokrasi atau dilatih menjadi pegawai administrasi. Besaran yang diterima pun sebesar f.30,- yang nantinya akan menyesuaikan menurut timbangan guru, untuk penjelasan besaran timbangan guru dan lainnya akan dijelaskan pada tabel berikutnya. OSVIA sebagai sekolah yang

bertujuan mencetak pamong praja yang lebih kompeten terdapat di beberapa tempat diantaranya Banten Selain sekolah seperti Pamong Praja sekolah lainnya yang diminati oleh siswa adalah sekolah Hukum Bumiputera atau *OSVIR* kepanjangannya adalah *Opleiding School voor Inlandsche Rechtskundigen* merupakan sekolah yang ditujukan untuk mencetak pegawai atau ahli hukum bumiputera untuk mengisi posisi di pengadilan bumiputera. Sekolah ini didirikan pada tahun 1909 dengan tujuan yang telah disebutkan di atas, sekolah ini merupakan hasil lanjutan dari MULO. Dana yang diberikan lebih besar dibanding pamong praja dikarenakan sekolah ini ditempuh dan hanya ada di Batavia dan Surabaya. Pendidikan lainnya seperti *Technische School* baik yang berada di Surabaya, Semarang, Batavia dan Yogyakarta mengalami perbedaan dalam pemberian dana perbulannya. Sekolah ini berfokus pada penguasaan teknik atau infrastruktur, baik untuk pengerjaan kereta api, perkapalan bahkan kerajinan. Tidak dijelaskan secara struktur bagian terkait adanya perbedaan dalam hal pendanaan ini, kemudian sekolah lainnya adalah sekolah HBS. Sekolah ini merupakan sekolah yang tergolong elite, dimana dalam pemberian mata pelajaran berkurikulum pada sekolah yang ada di Belanda. Nantinya siswa yang akan masuk ditempatkan sesuai dengan minat atau penjuruan dimulai ketika kelas IV dan V, terdapat dua penjurusan yakni *de wis en-natuurkunde afdeling* atau ilmu pasti dan alam dan yang kedua adalah *de literaire economische afdeling* atau yang mempelajari mengenai ekonomi, sastra dan Kebudayaan Yunani ([Indra Cipta Jaya, 2012](#)). AMS atau kepanjangan dari *Algemeene Middelbare School* suatu tingkat pendidikan yang setara dengan pendidikan menengah umum di masa sekarang. Sekolah ini pertama kali dibuka di Yogyakarta 5 Juli 1919 dengan nama *AMS Afdeling B* (Bagian ilmu alam dan Pasti), tahun selanjutnya dibuka di Bandung dan setelahnya di Jakarta dan Malang. Dana yang didapatkan tiap siswa yang masuk sekolah ini tidak sebesar H.B.S namun juga tidak kecil. MULO atau kepanjangan dari *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* merupakan sekolah umum yang berdiri sendiri, jadi serupa dengan Sekolah Menengah Pertama di masa kini. Tahun 1917 sekolah ini baru berada di beberapa tempat salah satunya di Surakarta, dan sisanya berada di luar Jawa Tengah bahkan pulau. Biaya yang diberikan pun berbeda, didasarkan pada apakah siswa ini bersekolah masih lingkup satu kota dengan orang tuanya atau tidak, dari sini nampak bahwa besarnya lebih besar jika orang tuanya berada di luar kota. Sekolah-sekolah setelah MULO merupakan sekolah tingkat tinggi, sekolah-sekolah ini bisa dikatakan setingkat dengan universitas atau sarjana keahlian di masa sekarang. Jika dijabarkan satu persatu maka akan diperoleh kejelasan sebagai berikut; *Hoogere Kweek School* merupakan sekolah setingkat akademi namun berfokus pada keguruan atau pendidikan. Harapannya para alumnus dari sekolah ini menjadi pengajar dengan penguasaan kurikulum ala Belanda atau Barat, kemudian *STOVIA* salah satu sekolah yang bergengsi di masa itu dimana dari sini lahir organisasi *Boedi Oetomo* sebagai wadah pergerakan kaum terpelajar intelektual. Dari kongres pertama mereka yang menarik perhatian dari kalangan pers, dari pembicaraan serta gagasan yang ada pada kongres ini yang membangkitkan semangat pemberian dana belajar oleh Mangkunegara. Sekolah lain seperti pada tabel mendapat dana yang cukup besar karena kembali lagi menurut timbangan guru serta *Commissie* yang bertugas, dan dana yang paling besar ada pada *Hogere Landbouw School Wageningen* bagi siswa yang bersekolah di sini terhitung selama setahun besarnya telah ditentukan sejumlah di atas. Pendidikan yang ditempuh berfokus pada pertanian atau agrikultur pertanian tropis. Bahasa yang digunakan pun menggunakan bahasa Belanda, sekolah di atas memiliki besaran berbeda karena peraturan yang ditetapkan oleh sekolah mereka, maka dana tersebut telah menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah mereka.

Kemudian pada lampiran atau surat turunan yang diperiksa pada tanggal 19 Desember 1924 atau pada Arsip MN VII A.590, sebagian besar disebutkan beberapa nama serta jumlah anak-anak yang mendapatkan pertolongan ongkos sekolah dari *Studiefonds* dan sekolah asalnya. Berikut jumlah serta nama sekolah yang terlampir; 1).A.M.S. Djokja sejumlah 3 siswa, 2).OSVIA Madioen sejumlah 6 siswa, 3). T.S. Semarang sejumlah 4 siswa, 4). H.K.S Poerworedjo sejumlah 2 siswa, 5). T.S. Soerabaja sejumlah 3 siswa, 6). T.S.Djokja sebanak 1 siswa, 7). B.A.S. Soerabaja sejumlah 3 siswa, 8). H.B.S. Bandoeng sejumlah 2 siswa, 9). HBS Semarang sejumlah 1 siswa, 10). MULO Solo sejumlah 22 siswa, 11). MULO Madioen sejumlah 1 siswa, 12). MULO Semarang sejumlah 1 siswa, 13). THS Bandoeng sejumlah 1 siswa, 14). [M.L.S](#) Buitenzorg sejumlah 2 siswa, 15). Kweekschool Goenoengsari sejumlah 2 siswa, 16).

Nias Soerabaja sejumlah 2 siswa, 17). Chr.MULO Djokja sejumlah 1 siswa, 18). Osir dan K.W.S. Weltevreden sejumlah 3 siswa.

Laporan yang masuk pada tanggal 30 Juni 1928 menerangkan permohonan baru baik *Studiefonds* A maupun B mengalami beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan penyesuaian didasarkan pada laporan belajar. Tabel di bawah ini menjelaskan bagaimana permohonan baru disusun dan disetujui oleh KGPA. Mangkunegara VII;

Tabel 1.2. Daftar *Studiefonds* Dari Keadaan Permohonan Baru,

Tahun Belajar 1928/1929, *Arsip Mangkunegara VII Nomor 607*

1. *Boewat jang ada bak diperlindoengi dari oewang Studiefonds Negeri*

Nama anak, oerang toewa, dan pangkatnja	Darimana dan akan kemana sekolahnja	Keloewaran orang toewanja (keloewaran dari Negeri)	Dapatnja tolongan meneoeroet timbangan dari Commissie Van Advies
Poedjono-Hardjoprakoso-Kliwon Matonimpoeno	Dari A.M.S. Djokja ke T.H.S.Bandoeng	f.325,-	Haroenya diberinja: a. Collegegeld p/j f.300 b. makan enz.p/m f.25,- c. alat beladjar menoeroet timbangan dari goeroe
Soedamo-Hardjodikarjo, Panewoe Pangrehprodjo (a)	A.M.S.Djokja	f.140,-	Haroes Diberinja: a. schoolgeld f.7,50,- b. makan enz. f.15,- c. alat beladjar menoeroet timbangan dari goeroe
R.M.Soemardi-Mangoen-Koesoemo, (Sentana Boejoet, anak Boepati-Patih jang telah meninggal)	Dari M.U.L.O Solo ke A.M.S.Djokja	-	Haroes Diberinja: a. schoolgeld f.7,50 b. makan enz f.20 c. alat beladjar menoeroet timbangan goeroe
Soejoet-Ponntjowirjono, Demang Kepala Desa	Dari M.U.L.O.SOLO ke A.M.S.Djokja	f.30,- (Sawah)	Haroes diberinja: a. schoolgeld f.7,50 b. makan enz. f20 c. alat beladjar menoeroet timbangan goeroe
R.Kajatmo-Martosoelijan, Gep.Panewoe	Dari H.I.S.M.N. ke T.S.Djokja	f.27,50,-	Haroes diberinja: sama sekali f.15,-p/m

Martonimpoeno			
Soeharto-Taroetjahjono, Ronggo Kepala Desa telah meninggal (b)	Dari Voorkl.M.U.L.O.Solo ke H.I.K.Djokja	-	Haroes dibberinja: sama sekali f.10,p/m
Soemarni-Hardjopradoto, Panoewoe Pangrehpradjo (c)	Dari H.I.S.M.N. ke Van Deventersch Solo	f.140,-	Haroes diberinja: sama sekali f.17,50

2. Boewat jang hanya bisa dapat hal diperlindoengi dari oeawang *Studiefonds* tjitjilan kembali

Soemardjo-Karjoredjo, Kebajan Desa	Chr.H.I.S. Solo ke Chr.M.U.L.O. Solo	f.7,50 ,- (sawah)	Haroes diberinja sama sekali f.10,-
Soepardjo-Wirokartono, Particulier di Desa Najoe (Gondangredjo)	Chr.sehakelschool Solo ke T.S.Djokja	f.10,-	Haroes diberinja sama sekali f.15,-
Soebekti-Nitipoestoko, Mantri garap Katian	Neutrale H.I.S.Solo- H.B.S. Semarang	f.75,-	Haroes diberinja: a. Schoolgeld f.15,- b. makan enz. f.15,- c. alat beladjar, emoeroet timbangan dari goeroe

Di tahun yang sama juga dilaporkan beberapa siswa sebagai lampiran baik yang sudah tamat belajar, yang pindah tempat belajar, dan yang tidak naik kelas. Lampiran ini kemudian diberi pertimbangan serta keterangan dari *Commissie Van Advies* guna memperjelas langkah selanjutnya dari penerima *Studiefonds* tersebut. Sebagai contoh kasus merujuk pada Arsip MN VII nomor A.607, ada seorang anak yang dengan kehendaknya sendiri atau maunya sendiri kemudian keluar dari belajarnya. Kondisi anak ini tidaklah naik kelas yang mendapatkan dana dari jenis *Studiefonds Negeri*, dengan begitu dapat dikatakan bahwa semua atas kemauannya sendiri. Berbeda dengan yang sudah menyelesaikan pendidikannya, akan diberi keterangan apakah akan lanjut atau mencari pekerjaan.

Penerima *Studiefonds* baik A atau B menanggung risiko sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan dari *Commissie Van Advies*, bahwa beberapa murid yang tidak naik kelas melalui pertimbangan Kepala sekolahnya memilih untuk tidak lanjut atau keluar dari belajarnya. Selain hal tersebut yang menjadi pertimbangan ketika yang memilih bekerja, tidaklah kurang untuk mencicil uang yang dipakai tiap bulan merujuk pada Arsip Mangkunegara VII Kode A-644, uang yang telah digunakan kemudian akan dicicil tiap bulannya sebanyak 20% diambil dari penghasilan perbulannya. Bagi penerima yang bekerja di Mangkunegaran dikenakan f50,- atau jika dipresentasikan paling sedikit 5%, lantas bagaimana dengan penerima yang tidak bekerja untuk Praja? bagi penerima yang tidak bekerja untuk Praja dikenakan 10% dari jumlah penghasilannya.

3.3. Dampak Pengadaan *Studiefonds* dan Peranan Mangkunegara VII Dalam *Studiefonds*

Pengadaan *Studiefonds* menjadi suatu gebrakan terbaru bagi kaum terpelajar bumiputera, pasalnya perubahan arah politik pemerintah kolonial membawa arus yang menekankan bahwa bumiputera berhak mendapat pendidikan serta penghidupan yang layak. Implementasi pengadaan dana belajar atau *Studiefonds* ini sebagai salah satu pengembangan dari Trilogi Politik Etis yakni, Edukasi. Pengadaan *Studiefonds* dapat dikatakan berhasil, perlu digaris bawahi setiap pemimpin Mangkunegaran yang memimpin pastinya memiliki kebijakan masing-masing. Mangkunegara VI setelah berjaya mengembalikan uang kas praja merasa perlu membenahi pendidikan, sesaat setelah turunnya Mangkunegara VI diteruskannya pemerintahan Praja oleh keponakannya yakni, RM. Soerjo Soeparto, atau Mangkunegara VII. Pada bab sebelumnya telah dipaparkan besaran yang harus dibayarkan oleh penerima, bagaimana raport serta pertimbangan dari *Commissie* sebagai perpanjangan tangan Mangkunegara dalam melaksanakan atau mendistribusikan dana pendidikan tersebut.

Trilogi Politik Etis memberikan dampak yang mengubah tatanan kehidupan bumiputera dan pemerintah kolonial secara umum, dampak yang terasa pada tatanan kehidupan sosial dan berbudaya ada pada pengadaan pendidikan modern. Pendidikan modern yang diusung oleh Van Deventer serta partainya memiliki dampak yang terasa nyata bagi bumiputera, dengan diadakannya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar selain bahasa Melayu diharapkan mampu menjadi permulaan yang baik untuk menjembatani bumiputera dan bangsa Belanda dalam berkomunikasi. Semangat ini hadir sebagai suatu bentuk keprihatinan orang Eropa atas merosotnya kemakmuran bumiputera (Niel Van, 1984). Di atas telah disebutkan bahwa *Studiefonds* merupakan dampak dari implementasi dari Trilogi Politik Etis yang dijalankan di Hindia-Belanda, desakan untuk menghadirkan pendidikan berbasis Barat dilaksanakan paruh abad XX. Mangkunegara VI dan VII mengadakan suatu kemajuan dan kebermanfaatannya dalam pendidikan, diberikannya *Studiefonds Mangkunegaran* adalah wujud nyata bahwa pada abad itu pendidikan sangat penting. Berikut dampak adanya *Studiefonds* bagi penerimanya adalah sebagai berikut; 1). Pengadaan Tenaga Kerja, pada dasarnya gerakan Trilogi Politik Etis merupakan suatu bentuk atas pengadaan tenaga kerja yang lebih ahli. Melalui pendidikan yang terstruktur atau model pembelajaran serta memakai bahasa Belanda sedikit meringankan beban pemerintah Kolonial, maupun Praja dalam hal pengelolaan pegawai. Tenaga kerja yang dimaksud setidaknya mampu berbicara Bahasa Belanda, bisa membaca dan menulis. Dalam laporan yang ditulis oleh *Commissie* untuk tahun belajar 1928/1929, disebutkan bahwa siswa yang telah lulus beberapa ada yang akan melanjutkan pendidikannya dan ada yang mencari pekerjaan. Pengadaan tenaga kerja merupakan hal yang penting selain apa yang telah disebutkan di atas, dan tidak memungkinkan pula untuk pemerintah kolonial membawa atau mendatangkan ahli atau tenaga dari Belanda karena faktor keuangan. Selain membaca dan menulis setidaknya mereka mampu menguasai pertukangan yang dibutuhkan di usaha usaha milik Praja. Dengan adanya pemberian *Studiefonds* diharapkan mampu memberi sarana bagi kerabat dan lainnya di wilayah Praja untuk melanjutkan sekolah dan memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun sekitar. 2). Munculnya Kelas Sosial Baru, pendidikan yang dikemas dengan model serta sistem Barat sedikit dinikmati hanya kalangan menengah ke atas, pendidikan yang diharapkan pemerintah kolonial masih menerapkan batasan nyata. Berbaurnya putra-putri dari kalangan menengah ke atas menjadikan terbentuknya sebuah keadaan sosial yang baru, kalangan priyayi Jawa yang 'baru' atau yang 'lebih rendah', pejabat yang maju dan yang memandang pendidikan sebagai kunci menuju kemajuan, adalah kelompok yang pertama yang mengambil prakarsa (Ricklefs, 2008. 353). Munculnya pemikiran serta adanya kegiatan menghimpun merupakan hal yang marak terjadi pada abad XX, dimana kaum terpelajar membentuk suatu tatanan baru dan budaya baru di kalangan masyarakat abad tersebut. Pendidikan yang didapatkan mereka menjadikan mereka berpikiran kritis dalam menghadapi ketidakadilan yang ada pada masa itu. Sebagai contoh adalah organisasi Boedi Oetomo, pada dasarnya merupakan suatu organisasi priyayi Jawa (Lombard, 2005). Organisasi ini secara resmi menetapkan bahwa bidang perhatiannya meliputi penduduk Jawa dan Madura (Ricklefs, 2008. 355). Mengutip karya yang berjudul "Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa", khususnya dalam pernyataan Soewarno terkait keanggotaan pada bulan Juli jumlah anggota sebanyak 650, kemudian di bulan September menjadi 900. Angka terakhir ini meningkat menjadi 1.200 ketika pernyataan diumumkan. Juga sifat keanggotaan

berubah. Angka pertama dalam pernyataan disebutkan 300 orang pejabat dan orang bumiputera (yakni bukan siswa) dan 900 anggota. Angka berikutnya 700 dari 1.200. Kongres yang diadakan menarik perhatian pers, diadakan dari 3-5 Oktober 1908, dalam jalannya kongres ini delegasi tidak menyetujui adanya gagasan kongres hanya terbatas pada beasiswa. Dari kongres ini menginspirasi Mangkunegara VI untuk memberikan dana belajar bagi prajanya. Pendidikan yang diberikan melalui *Studiefonds* selain memberikan sumbangan tenaga bagi pemerintah Hindia-Belanda dan Praja, juga melahirkan pemikiran-pemikiran progresif dan melahirkan organisasi yang lebih aktif dan penting. Adanya golongan terpelajar baik di lingkungan Praja maupun luar dapat memberikan bantuan berupa permohonan untuk mendapatkan *Studiefonds* yang tujuannya untuk melanjutkan pendidikan.

Selain dampak yang diberikan oleh *Studiefonds* melihat peranan Mangkunegara VII dalam melaksanakan kebijakan di ranah pendidikan yang cukup baik, pendidikan yang diselenggarakan oleh Mangkunegara VII dapat dikatakan berhasil karena dengan adanya pemberian *Studiefonds* tingkat pendidikan yang didapatkan pun juga meningkat. Mangkunegara VII selama masa pemerintahannya juga mulai memperbaiki serta menambah sekolah yang ada di sekitar Praja, salah satunya adalah sekolah Siswo Rini. Sekolah yang berdiri sebagai wujud upaya Mangkunegara VII dalam membenahi kehidupan serta pola kehidupan perempuan di Praja. Sekolah lain yang turut dibangun oleh Mangkunegara VII adalah *MULO School Mangkunegaran* dan sekolah-sekolah desa. Perbaikan pendidikan untuk perempuan nampak sangat masih dilakukan oleh Mangkunegara VII, bahkan dalam beberapa kesempatan dukungan kepada kaum perempuan nampak diberikan. Perkembangan pendidikan di Mangkunegaran tidak akan lepas dari peran pemberian *Studiefonds* oleh Mangkunegara VI dan VII, Mangkunegara IV dalam usahanya mengembangkan usaha milik Praja yakni pabrik gula setidaknya dalam ranah pendidikan adanya sikap berpedoman pada tradisi Jawa. Sedangkan Mangkunegara V dalam perjalanannya memimpin Praja mengalami krisis keuangan Praja sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam mengelola keuangan. Kegemilangan pendidikan modern dirasa pada masa kepemimpinan Mangkunegara VI dan VII, dimana telah berhasil menstabilkan keuangan Praja, kemampuan dalam berpikir panjang dan modern. Sekolah-sekolah yang dibangun oleh Praja maupun Sekolah lain yang turut dibangun oleh Mangkunegara VII adalah *MULO School Mangkunegaran* dan sekolah-sekolah desa. Perbaikan pendidikan untuk perempuan nampak sangat masih dilakukan oleh Mangkunegara VII, bahkan dalam beberapa kesempatan dukungan kepada kaum perempuan nampak diberikan. Pada laporan keadaan permohonan baru tahun belajar 1928/1929 atau pada tabel 1.2. nampak terdapat abjad kecil di bawah nama siswi, adanya kenaikan dana sebanyak f 17,50/bulan. Melalui pertimbangan *Commissie* dan atas persetujuan Mangkunegara VII, maka dana yang awalnya diberikan sebesar f 25 untuk menjaga derajatnya sebagai anak perempuan maka dikeluarkannya pertimbangan tersebut. Selain peningkatan mutu pendidikan, tidak hanya membentuk sebuah *Commissie* namun juga membentuk kebendaharaan sendiri sebagai wadah atau lanjutan dari *Commise*. Tahun 1930 an menjadi batasan akhir dalam pembahasan, pembatasan ini sebagai akibat adanya krisis ekonomi global atau krisis Malaise. Perlu diketahui bahwa pemberian atau jalannya *Studiefonds* hingga tahun 1940 an, dana yang diberikan mungkin tidak sebesar sebelum adanya krisis tersebut namun masih cukup untuk memberikan biaya sekolah.

4. Simpulan

Pendidikan yang diadakan oleh Praja Mangkunegaran berkembang perlahan namun ketika memasuki akhir abad sembilan belas hingga abad dua puluh, Praja Mangkunegaran tampil sebagai prakarsa sekolah bergaya Barat tanpa meninggalkan budaya Jawa sebagai akarnya. Mangkunegara IV sebagai seorang pengusaha telah mengusahakan untuk menanamkan pendidikan berbasis Jawa, harapannya agar anak keturunannya hidup berpegang teguh pada pedoman Jawa. Selain Mangkunegara IV pada masa kepemimpinan Mangkunegara V memiliki tugas yang cukup berat, keadaan keuangan yang menurun drastis mengakibatkan terhambatnya usaha-usaha milik Praja. Setelah Mangkunegara V tampuk pemerintahan Praja dipegang oleh Mangkunegara VI, tugas pertama yang dihadapi adalah dengan mengembalikan keadaan keuangan Praja seperti sedia kala. Tidaklah mudah dalam mengembalikan

keadaan ini namun, dengan keuletan Mangkunegara VI akhirnya keuangan Praja kembali. Kembalinya keuangan Praja serta didorong dengan adanya perubahan angin politik menjadikan Mangkunegara VI menyesuaikan diri serta kebijakan yang akan diambil. Perubahan politik ini membangkitkan rasa kepedulian Mangkunegara VI untuk memberikan dana belajar atau *Studiefonds* bagi Sentana, Abdi dan Nara di Praja. Pemberian dana ini disetujui serta diketahui oleh Residen Surakarta kala itu. Pemberian dana ini berlanjut hingga Mangkunegara VII, pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang modern menjadikan Mangkunegara VII berhasil menyesuaikan keadaan Praja dengan keadaan arus politik kala itu. Dr.J. Stromberg melalui tulisannya menyebutkan, di tahun 1927 jumlah penduduk yang ada di Surakarta sebanyak 157.724 meliputi orang Belanda sebanyak 3.214.

Studiefonds sebagai alat dalam merespon kemajuan pendidikan abad dua puluh dan kemajuan pendidikan yang ada di Praja sebagai imbas adanya politik etis, pengembangan pendidikan menyesuaikan model Barat namun pada tahap pendidikan yang didirikan oleh Praja tetap disampaikan kurikulum atau pembelajaran materi Jawa. Pemberian *Studiefonds* memiliki dua jenis yakni *Studiefonds A* dan *Studiefonds B*, pemberian ini memiliki perbedaan dimana uang kembali dari *Studiefonds B* akan disimpan dan kemudian dipinjamkan kembali. Pemberian *Studiefonds* telah didasarkan pada ketentuan KGPAA Mangkunegara VII, laporan raport tiap semester hingga pertimbangan dari pihak commissie dan sekolah. Selain hal tersebut siswa atau pemohon *Studiefonds* ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pemberian *Studiefonds* pada pelaksanaannya pun memiliki batasan, dimana hanya putra dari golongan tertentu yang dapat menerimanya. Kesempatan mengenyam pendidikan yang baik terbatas pada keadaan yang serba membatasi pergerakan bumiputera. Dampak dengan adanya baik *Studiefonds* maupun Pendidikan ala Barat adalah, terciptanya golongan priyayi baru yang lebih mengarah pada Priyayi intelektual. Selain memunculkan golongan baru dampak lainnya adalah, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten namun murah. Tak dapat dipungkiri dengan akses pendidikan yang baik dan sokongan dana belajar yang telah disesuaikan dengan sekolah menjadikan penerima dari *Studiefonds* memiliki kewajiban. Siswa yang tidak bekerja untuk Praja akan mencicil sebesar 10% tiap bulannya dan bagi yang bekerja untuk Praja akan mencicil sebesar 5%, dengan ini dapat dikatakan Praja mendapat untung dengan ketersediaan ahli yang dapat bekerja baik di bidang administrasi atau pun bidang teknis.

Pemberian ini berjalan hingga tahun 1940an dan mengalami krisis ekonomi yang melanda Hindia Belanda, keadaan ini sedikit membuat keuangan Praja sedikit turun. Penjualan gula Praja bergantung pada pasar Eropa namun karena hal ini, penjualan sedikit mengalami kerugian. Dampak dari krisis ini tidak begitu signifikan bagi *Studiefonds* namun, tetap demi berjalannya Praja kemungkinan pemberian dana akan sedikit di pertimbangkan lagi. Pemberian dana ini hanya ada pada kepemimpinan Mangkunegara VI dan VII, karena perubahan masa serta apa yang dihadapi tiap pemangku Praja berbeda beda. Dengan adanya pemberian dana belajar dapat dikatakan bahwa pendidikan di masa Politik Etis terutama di Praja Mangkunegaran berkembang lebih maju, dimana pendidikan yang ditempuh siswanya menjadi keuntungan baik bagi diri sendiri maupun bagi Praja.

References

- Bakri, S. (2018). "Surakarta Bergerak (Rekonstruksi Sejarah Pergerakan di Surakarta Awal Abad ke 20". 2018, 31, 361–378. <https://doi.org/10.31330/penamas.v31i2.231>
- Indra Cipta Jaya, G. K. (2012). "Hoogere Burgerschool (HBS): Pendidikan untuk Kaum Elite di Surabaya Tahun 1923-1950". *Verleden*, 1, 13–25.
- Junaidi, T. Bachtiar, Akob. (2014). "Malaise Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Nasional Indonesia". *Jurnal Seuneubok Lada*, 2.
- Kartodirjo, Sartono. (1972). *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Pada Abad ke-19*. Seksi Penelitian, Jurusan Sedjarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM.

- Kuntowijoyo. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.
- Lombard, Denys. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Makmur, D., et al. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Nagazumi, Akira. (1988). *Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa*. Tempo.
- Nasution, S. (1983). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jemmars.
- Niel Van, R. (1984). *Munculnya Elite Modern Indonesia*. PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Stroomberg, J. (2018). *Hindia Belanda 1930*. IRCiSoD.
- Susilo, Agus. Isbandiyah. (2018). "Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia". *Jurnal Historia*,6
- Sutherland, Heather. (1979). *Making Of A Bureaucratic Elite, The Colonialism Transformation Of The Javanese Priyayi*. Asian Studies Association of Australia.
- Utami, Arum Asti. (2019). "Perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Siswo Mangkunegaran di Surakarta Tahun 1951-1966". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sejarah*,4,16-30
- Wal, van der.S.L. (1977). *Pendidikan Di Indonesia 1900-1940*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Wasino. (2005). "Mangkunegara IV, Raja-Pengusaha, Pendiri Industri Gula Mangkunegaran (1861-1881)". *Jurnal Humaniora*, 17, 31–37. <https://doi.org/10.22146/jh.825>
- Wasino. (2008). *Kapitalisme Bumi Putra*. PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Wasino. (2014). *Modernisasi Di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896-1944*. Kompas.
- Wibowo, A. G. (2011). "Pendidikan Dan Perubahan Sosial Mangkunegaran Surakarta 1912-1940". *Jurnal Agastya*, 01. <https://doi.org/10.25273/AJSP.V112.710>

Arsip:

Arsip Mangkunegara VII Kode A.64

Arsip Mangkunegara VII Kode A.509

Arsip Mangkunegara VII Kode A.607

Arsip Mangkunegara VII Kode A.644

Jaarverslag Studiefonds Mangkoenegaran boeat taon 1929

Ketetapan Besarnya Dana *Studiefonds* Tiap Bulan Tahun 1919

Rijksblad Mangkunegaran tahun 1917 bernomor 20

Tweede Jaarverslag dari *Mangkunegarasche Studiefonds* yang diperiksa sampai penghabisan taon 1924

Verslag Van Het Mangkoenagaraprosche Studiefonds Over het Boekjaar 1930